



TERUS  
MELAJU  
UNTUK  
INDONESIA  
MAJU

KATALOG : 4601007.14

# PROFIL DEMOKRASI INDONESIA

*di Provinsi Riau*

2022



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI RIAU**



TERUS  
MELAJU  
UNTUK  
INDONESIA  
MAJU

# PROFIL DEMOKRASI INDONESIA

*di Provinsi Riau*

2022

<https://riau.bps.go.id>



## PROFIL DEMOKRASI INDONESIA DI PROVINSI RIAU 2022

ISSN : 2657-0874  
Nomor Publikasi : 14000.2338  
Katalog : 4601007.14  
Ukuran Buku : 17,6 cm X 25 cm  
Jumlah Halaman : xii + 47 Halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Penyunting : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Diterbitkan Oleh : © Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Dicetak Oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Sumber Ilustrasi : *canva.com*

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## TIM PENYUSUN

**Pengarah:**

Asep Riyadi, S.Si., M.M

**Editor :**

Meita Komalasari, SST, M.Si.

Fitri, S.Si, M.E.

**Penulis :**

Metalia Alfa, SST

Tasya Amelia Putri

**Pemeriksa Tabel/Grafik :**

Fitri, S.Si, M.E.

**Desain Cover dan Infografis :**

Ade Widiantara, S.Tr.Stat.

Tasya Amelia Putri

Okta Bella Syuhada



## KATA PENGANTAR

Demokrasi merupakan indikator semakin majunya tatanan politik dan kehidupan berbangsa suatu negara. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi Negara (pemerintah) dan masyarakat.

Publikasi Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 2022 berisi data capaian IDI yang merupakan gambaran kondisi demokrasi di Provinsi Riau selama tahun 2022. Data IDI 2022 dihitung menggunakan metode baru sejak tahun 2021 sehingga hanya dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Publikasi ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi Riau dalam menyusun strategi pembangunan politik yang lebih tepat. Selain itu, data IDI dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk melihat perbandingan demokrasi antar provinsi di Indonesia.

Kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini diucapkan terimakasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Pekanbaru, Agustus 2023  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Riau



Asep Riyadi



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	xi
<b>Pendahuluan</b>	<b>3</b>
Latar Belakang	3
Tujuan	5
Metodologi	6
Sistematika Penulisan	11
<b>Indeks Demokrasi Indonesia</b>	<b>15</b>
Aspek IDI dan Posisi Riau di Indonesia	16
Indikator IDI Provinsi Riau	22
<b>Penutup</b>	<b>31</b>
Kesimpulan	31
Saran	33
Daftar Pustaka	39
Lampiran Sumber Data	43



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru.....	8
Gambar 2.1.	Indeks Demokrasi Indonesia, 2021-2022.....	15
Gambar 2.2.	Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau menurut Aspek Penyusun, 2021-2022.....	16
Gambar 2.3.	Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi, 2022.....	17
Gambar 2.4.	Aspek Kebebasan IDI menurut Provinsi, 2022.....	19
Gambar 2.5.	Aspek Kesetaraan IDI menurut Provinsi, 2022.....	20
Gambar 2.6.	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi IDI menurut Provinsi, 2022.....	21
Gambar 2.7.	Indikator IDI Aspek Kebebasan di Provinsi Riau, 2021-2022.....	23
Gambar 2.8.	Indikator IDI Aspek Kesetaraan di Provinsi Riau, 2021-2022.....	24
Gambar 2.9.	Indikator IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi di Provinsi Riau, 2021-2022.....	25
Gambar 3.1.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi dan Provinsi Riau menurut Aspek Penyusunnya, 2022.....	32
Gambar 3.2.	Indikator Penyusun Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau, 2022.....	34



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Indikator Indeks Demokrasi Indonesia pada Aspek Kebebasan.....	9
Tabel 1.2.	Indikator Indeks Demokrasi Indonesia pada Aspek Kesetaraan.....	10
Tabel 1.3.	Indikator Indeks Demokrasi Indonesia pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.....	10
Lampiran.	Sumber Data Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru.....	43



# Bab 1

## PENDAHULUAN

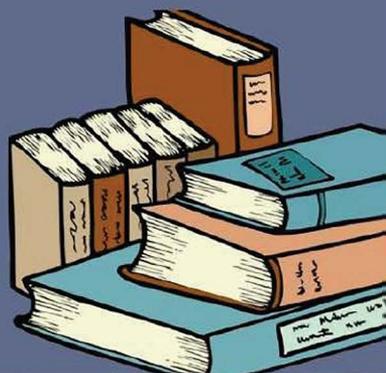


IDI merupakan ukuran untuk memotret kualitas perilaku demokrasi pemerintah dan masyarakat di sebuah wilayah. IDI diharapkan dapat menjadi ukuran demokrasi yang sesuai dengan falsafah Pancasila sehingga arah pembangunan politik Indonesia tidak menyimpang dari ideologi bangsa.

## METODOLOGI

Penghitungan IDI metode baru ini sudah berjalan sejak 2021 dan tahun ini merupakan tahun kedua.

Metode ini tetap menggunakan triangulasi (kombinasi metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif) dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain.



## METODE BARU

**ASPEK 1  
KEBEBASAN**

(7 Indikator)

**ASPEK 2  
KESETARAAN**

(7 Indikator)

**ASPEK 3  
KAPASITAS LEMBAGA  
DEMOKRASI**

(8 Indikator)



# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Perencanaan pembangunan demokrasi di daerah yang begitu beragam memerlukan data empirik yang dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. IDI dibangun untuk memenuhi kebutuhan tersebut, khususnya memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di tingkat Provinsi.

### Kilas Balik IDI 2009-2020

IDI merupakan ukuran untuk memotret kualitas perilaku demokrasi pemerintah dan masyarakat di sebuah wilayah. IDI diukur khusus untuk Indonesia sehingga cara pengukurannya berbeda dengan indeks-indeks lain yang unit analisisnya negara. IDI 2009-2020 telah menjadi rujukan pembangunan politik nasional dan daerah. IDI memiliki keunggulan berupa data dan informasi yang detail karena yang dikumpulkan adalah kasus dan data riil. Dengan data tersebut, dinamika kualitas demokrasi lebih mudah dijelaskan dan diintervensi (diperbaiki) oleh pemerintah dan masyarakat.

Dalam perjalanannya IDI memperoleh masukan dari akademisi, masyarakat, pemerintah daerah, K/L, hingga DPR. Sebagai tindak lanjut, masukan-masukan tersebut diinventarisir beriringan dengan evaluasi pada data dan hasil IDI yang telah dihitung. IDI diharapkan dapat menjadi ukuran demokrasi yang sesuai dengan falsafah Pancasila sehingga arah pembangunan politik Indonesia tidak menyimpang

dari ideologi bangsa. Dengan demikian, ukuran-ukuran yang digunakan IDI diharapkan mengandung nilai-nilai penting dalam Pancasila.

#### Revisi Metodologi IDI

Pada tahun 2010, IDI 2009 untuk pertama kalinya dirilis. Kemudian angka IDI terus dirilis setiap tahunnya. Pada tahun 2018, Bappenas resmi mengawali kajian revisi IDI. Revisi IDI dilakukan dengan kolaborasi tiga lembaga riset, yaitu Cakra Wikara Indonesia (CWI), SMERU *Research Institute*, dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina. Angka IDI 2020 merupakan IDI terakhir yang menggunakan metode lama. Pada tahun 2022 IDI telah dihitung dengan menggunakan metode baru.

#### Urgensi Perbaikan Metode IDI

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada RPJMN 2010–2014, 2015–2019, serta 2020–2024. IDI merupakan kerja bersama instansi pemerintah yaitu Kemendagri, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah. IDI pertama kali dihitung BPS pada tahun 2009. Selama 12 tahun penghitungan, dijumpai beberapa indikator tidak lagi relevan sehingga perlu perbaikan. Selain itu saran dan masukan juga diperoleh dari berbagai kalangan. Diperlukan proses yang tidak sederhana untuk melakukan kajian revisi, agar hasilnya bisa lebih baik dari metode yang ada.

Cara pandang IDI metode lama hanya fokus pada perspektif politik. Sementara, teori demokrasi yang berkembang saat ini melihat demokrasi dalam sudut pandang

yang lebih luas di mana aspeknya mencakup politik, sosial, dan ekonomi. Penggunaan faktor sosial dan ekonomi sebagai ukuran demokrasi tidak ditemukan dalam ukuran Indeks demokrasi lain (*Freedom House, The Economist, Polity Project*, dll). Namun, dalam konteks Indonesia ini sejalan dengan demokrasi Pancasila karena kesetaraan dan keadilan pada bidang sosial ekonomi merupakan hal yang esensial dalam Pancasila dan UUD 1945. Pendekatan yang melibatkan dimensi sosial dan ekonomi ini sebelumnya pernah digunakan konsorsium *Asia Democracy Review* untuk mengukur *Asia Democracy Index* (2011–2013).

Selain itu, IDI metode lama belum mengukur kinerja demokrasi pada tingkat Pusat. IDI Pusat menggambarkan perilaku demokrasi di level Pusat, seperti eksekutif (K/L), legislatif (DPR dan DPD), dan yudikatif (MA dan MK). Di sisi lain, diperlukan perubahan pada beberapa indikator IDI yang sudah kurang sensitif dalam menangkap dinamika demokrasi serta perbaikan metodologi penghitungan agar secara statistik lebih tepat seperti bobot, penghitungan skor, dan agregasi indeks. Diperlukan juga perluasan sumber data untuk memberikan gambaran yang lebih akurat serta penyederhanaan tahapan kerja.

## **Tujuan**

Secara umum tujuan penulisan publikasi Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau ini adalah untuk mendiseminasikan dan menyosialisasikan hasil IDI serta pemanfaatannya sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan seluruh *stakeholders* terkait IDI

metode baru. Secara khusus, tujuan penulisan publikasi ini juga untuk memberikan gambaran komprehensif terkait indikator-indikator IDI metode baru terutama IDI Provinsi Riau sehingga dapat meningkatkan peran dan kontribusi *stakeholders* dalam pengukuran IDI serta memanfaatkannya dalam setiap penentuan kebijakan.

## Metodologi

Metode penghitungan IDI metode baru tetap menggunakan triangulasi, yakni menggabungkan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Data kuantitatif dikumpulkan melalui penelusuran kejadian di koran cetak serta portal berita *online*, data sekunder, serta indeks yang dihasilkan oleh instansi pemerintah.

Koran yang digunakan adalah koran dengan oplah terbesar yang ada di provinsi. Pengecualian jika koran tersebut memiliki segmen yang spesifik (misal ekonomi, atau kriminalitas) sehingga tidak banyak memuat berita-berita yang bersifat umum. Untuk di provinsi Riau, menggunakan berita-berita dari Koran Riau Pos yang dikumpulkan oleh personel BPS Provinsi Riau, sementara untuk data pusat dan nasional akan dikumpulkan oleh Fungsi Statistik Politik dan Keamanan di BPS RI. Sementara itu, portal berita *online* yang digunakan sebagai sumber data adalah *kompas.com*, *detik.com*, *antaranews.com*, *tribunnews.com*, *tirto.id*, *kumparan.com*, dan *jpnn.com*.

Data tersebut divalidasi dalam FGD yang melibatkan ahli yang relevan. Dalam FGD ada tiga hal utama yang menjadi tujuan, yaitu konfirmasi, klarifikasi (koreksi), serta eksplorasi data baru yang belum tercakup dalam data kuantitatif. Validasi silang juga akan dilakukan pada data-data yang ada di FGD dengan menggunakan data kuantitatif yang tersedia.

#### Pemaknaan IDI

IDI menggambarkan kualitas perilaku demokrasi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Dengan demikian, tinggi rendahnya IDI di sebuah wilayah merupakan tanggung jawab bersama. IDI metode baru tidak bisa dibandingkan dengan IDI metode sebelumnya karena separuh indikator yang digunakan berbeda. Kenaikan atau penurunan angka IDI dari kedua metode tidak otomatis menggambarkan kenaikan atau penurunan kualitas demokrasi di sebuah wilayah.

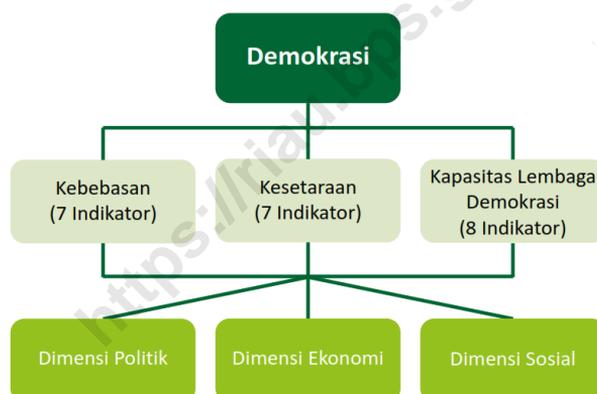
Sementara itu, *backcasting* IDI tidak bisa dilakukan karena tidak semua metode pengumpulan data memungkinkan untuk diulang, terutama FGD pada tingkat pusat yang sebelumnya tidak ada. Selain itu, ada beberapa indikator yang baru tersedia pada tahun 2022 seperti Indeks Keterbukaan Informasi yang dihasilkan oleh Komisi Informasi Pusat.

#### Aspek dan Indikator IDI

Demokratisasi tidak hanya diartikan sebagai perubahan dari pemerintahan diktator menjadi demokratis, melainkan lebih luas sebagai suatu proses demonopolisasi/pelepasan dari rezim monopoli, yang mencakup aspek politik, ekonomi,

maupun sosial menuju sistem demokrasi. Hee Yeon Cho (2008), seorang ilmuwan politik dari Korea Selatan, menjabarkan secara gamblang fenomena transisi demokrasi di Asia. Cho menekankan bahwa seorang diktator melakukan penguasaan tidak terbatas hanya pada sistem politik, tetapi juga monopoli berlapis atas penugasan sumber daya ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, pembaruan pengukuran IDI dilakukan untuk mengukur kualitas demokrasi secara lebih komprehensif dengan meletakkan konsep demokrasi secara lebih luas, yang meliputi ranah politik, ekonomi, dan sosial.

Gambar 1.1. Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru



Untuk mengukur perkembangan demokrasi maka demonopolisasi dioperasionalkan ke dalam dua aspek yaitu kebebasan (*liberalization*) dan kesetaraan (*equalization*). Dalam perspektif demonopolisasi maka aspek kebebasan diartikan sebagai sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat memperoleh kemandirian dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama, dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Sedangkan aspek kesetaraan diartikan sebagai proses sejauh mana kelompok

minoritas (yang mengalami diskriminasi dan eksklusi) secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor, dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Selain dua aspek tersebut, demonopolisasi juga dilihat dari aspek kapasitas lembaga demokrasi yaitu sejauh mana lembaga-lembaga demokrasi menginternalisasikan secara prosedural dan substantif upaya-upaya yang menjamin kebebasan dan kesetaraan.

Tabel 1.1. Indikator Indeks Demokrasi Indonesia pada Aspek Kebebasan

No.	Indikator	IDI Provinsi	IDI Pusat
1.	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	√	√
2.	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	√	-
3.	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	√	√
4.	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	√	√
5.	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat	√	-
6.	Pemenuhan hak-hak pekerja	√	-
7.	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	√	√

Aspek kebebasan mengukur proses sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri. Aspek kebebasan diukur dari 7 indikator, dimana 4 indikatornya juga mencakup IDI pusat.

Aspek kesetaraan mengukur sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan eksklusi dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi

setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Sumber daya di sini dapat berupa kebijakan, anggaran, jabatan, pelayanan, respek, dan sebagainya yang intinya memampukan kelompok-kelompok minoritas untuk berdaya. Aspek kesetaraan diukur dari 7 indikator dimana 3 di antaranya juga mengukur IDI di tingkat pusat.

Tabel 1.2. Indikator Indeks Demokrasi Indonesia pada Aspek Kesetaraan

No.	Indikator	IDI Provinsi	IDI Pusat
8.	Kesetaraan gender	√	√
9.	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	√	√
10.	Anti monopoli sumber daya ekonomi	√	-
11.	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	√	-
12.	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	√	√
13.	Akses masyarakat terhadap informasi publik	√	-
14.	Kesetaraan dalam pelayanan dasar provinsi	√	-

Aspek kapasitas lembaga demokrasi mengukur kinerja lembaga-lembaga demokrasi dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan. Aspek kapasitas demokrasi diukur dari 8 indikator dimana 7 di antaranya mengukur demokrasi di tingkat pusat.

Tabel 1.3. Indikator Indeks Demokrasi Indonesia pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

No.	Indikator	IDI Provinsi	IDI Pusat
15.	Kinerja lembaga legislatif	√	√
16.	Kinerja lembaga yudikatif	√	√
17.	Netralitas penyelenggara pemilu	√	√
18.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	√	√

19.	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	√	-
20.	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	√	√
21.	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	√	√
22.	Pendidikan politik pada kader partai politik	√	√

### **Sistematika Penulisan**

Publikasi ini terdiri dari tiga bab. Pada Bab 1 yaitu Pendahuluan, menyajikan latar belakang, tujuan penyusunan publikasi, metodologi, dan sistematika penulisan. Bab 2 tentang Indeks Demokrasi Indonesia yang menggambarkan hasil penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia yang terdiri dari gambaran posisi IDI Provinsi Riau di Indonesia serta nilai aspek dan indikator IDI Provinsi Riau. Bab 3 yaitu Penutup, akan membahas kesimpulan dan saran terhadap IDI Provinsi Riau.



# Bab 2

## INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

IDI NASIONAL PADA TAHUN 2022 SEBESAR

80,41

Angka ini naik sebesar 2,29 dari angka IDI Nasional pada tahun 2021 dan angka ini sudah melewati target IDI di RPJMN yang pada 2024 ditargetkan mencapai 78,37

73,64

IDI PROVINSI RIAU SEBESAR

Angka ini menurun sebesar 2,02 dari angka IDI Provinsi Riau tahun 2021 dengan nilai 75,66. IDI Provinsi Riau berada pada

KATEGORI SEDANG

## INDEKS DEMOKRASI INDONESIA di Provinsi Riau, 2022

IDI Provinsi Riau berada di peringkat **ke-29** diantara 34 provinsi di Indonesia

73,64

84,46

70,53

66,69

IDI

kebebasan kesetaraan

Kapasitas  
Lembaga  
Demokrasi

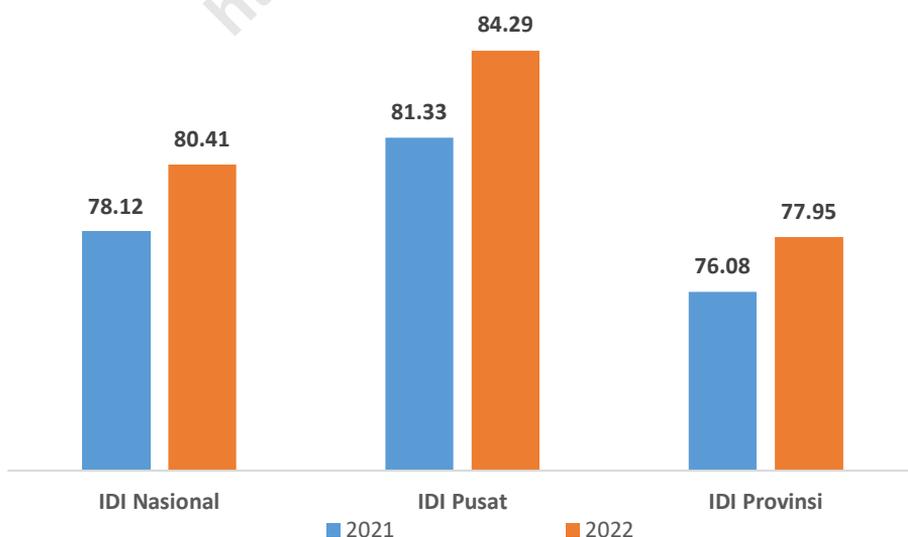
TEGAKKAN  
DEMOKRASI !!



## INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

IDI metode baru mengukur indeks provinsi (data dari lingkup provinsi), pusat (data dari Kementerian/Lembaga/Instansi di tingkat pusat), dan nasional yang merupakan agregasi indeks provinsi dan pusat. Dalam penghitungan indeks nasional, bobot indeks pusat adalah 0,39 dan bobot indeks provinsi adalah 0,61. Skala IDI berada pada rentang 0-100, di mana semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan kualitas demokrasi suatu wilayah yang semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah angka indeks, menunjukkan kualitas demokrasi suatu wilayah yang semakin buruk. Angka IDI dibagi dalam tiga kategori, yakni tinggi (>80), sedang (60-80), dan rendah (<60).

Gambar 2.1. Indeks Demokrasi Indonesia, 2021-2022

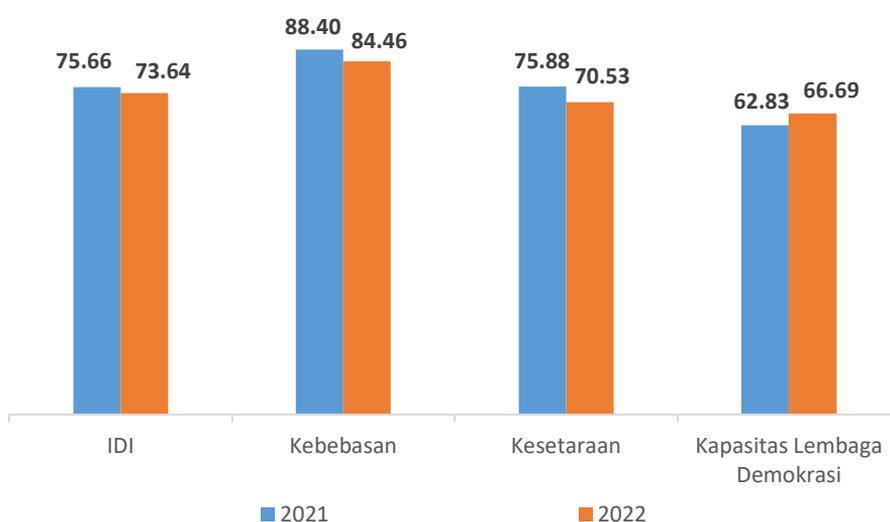


Demokratisasi di Indonesia perlu terus didorong, terutama di tingkat provinsi. IDI Nasional pada tahun 2022 adalah 80,41. Angka ini sudah melampaui target IDI di RPJMN, yang pada 2024 ditargetkan mencapai 78,37. Sementara itu, IDI Pusat tercatat 84,29 sedangkan rata-rata IDI Provinsi sebesar 77,95. Secara umum angka IDI tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

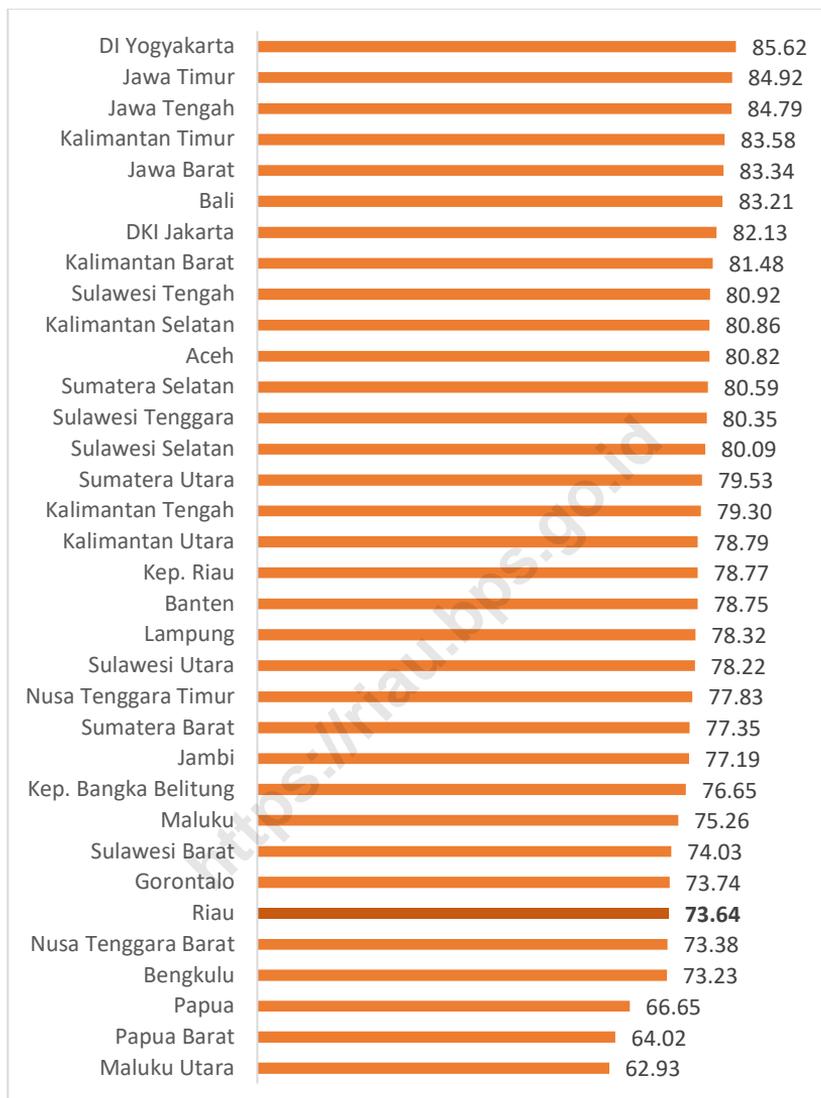
### Aspek IDI dan Posisi Riau di Indonesia

IDI di Provinsi Riau tahun 2022 sebesar 73,64 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 75,66. Namun demikian, nilai IDI Provinsi Riau pada tahun 2021 dan 2022 masih berada pada kategori sedang. Menurut aspek penyusunnya, nilai IDI Provinsi Riau aspek kebebasan dan kesetaraan mengalami penurunan, sebaliknya, pada aspek kapasitas lembaga demokrasi terjadi peningkatan.

Gambar 2.2. Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau menurut Aspek Penyusun, 2021-2022



Gambar 2.3. Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi, 2022



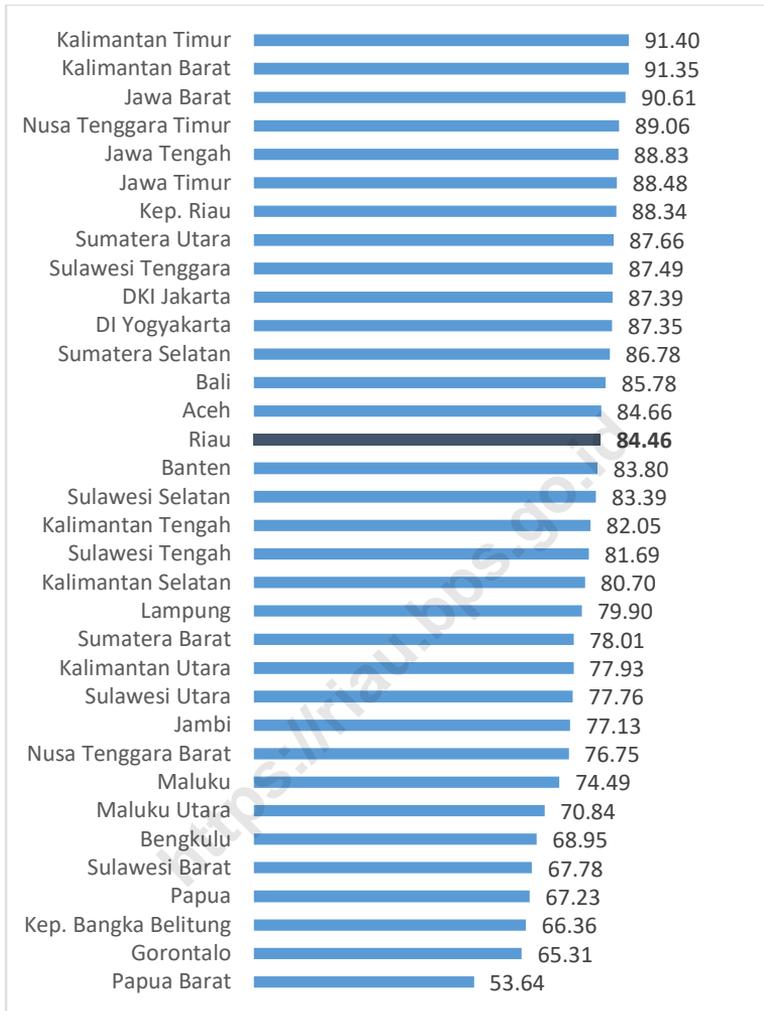
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut provinsi berkisar antara kategori sedang dan tinggi. Tidak ada provinsi yang memiliki nilai IDI dengan kategori rendah (<60). Terdapat 14 provinsi dengan capaian nilai IDI kategori tinggi (>80) dan 20 provinsi lainnya memiliki nilai IDI dalam kategori sedang (60-80).

Dari Gambar 2.3. terlihat bahwa IDI tahun 2022 tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 85,62 dan diikuti Provinsi Jawa Timur pada posisi kedua sebesar 84,92 serta Provinsi Jawa tengah pada posisi ketiga sebesar 84,79. Sedangkan, IDI terendah terdapat di Provinsi Maluku Utara yang memiliki capaian IDI sebesar 62,93. Sementara itu, IDI Provinsi Riau tercatat berada di posisi/peringkat ke-29 di antara 34 provinsi di Indonesia. Capaian IDI Provinsi Riau adalah sebesar 73,64 berada pada kategori sedang.

IDI terdiri dari 3 aspek penyusun yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Nilai aspek kebebasan IDI di Provinsi Riau merupakan nilai aspek tertinggi dibandingkan 2 aspek penyusun IDI. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 lalu, nilai aspek kebebasan masih berada pada kategori tinggi (>80). Aspek kebebasan IDI Provinsi Riau tercatat berada di posisi/peringkat ke-15 di antara 34 provinsi di Indonesia.

Dari Gambar 2.4. terlihat bahwa nilai aspek kebebasan IDI yang terdiri dari 7 indikator, yang tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 91,40 dan diikuti Provinsi Kalimantan Barat di posisi kedua sebesar 91,35. Sedangkan, nilai aspek kebebasan IDI terendah terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 53,64. Terdapat 20 provinsi dengan capaian nilai aspek kebebasan kategori tinggi (>80), 13 provinsi dalam kategori sedang (60-80) dan 1 provinsi memiliki capaian nilai aspek kebebasan kategori rendah.

Gambar 2.4. Aspek Kebebasan IDI menurut Provinsi, 2022

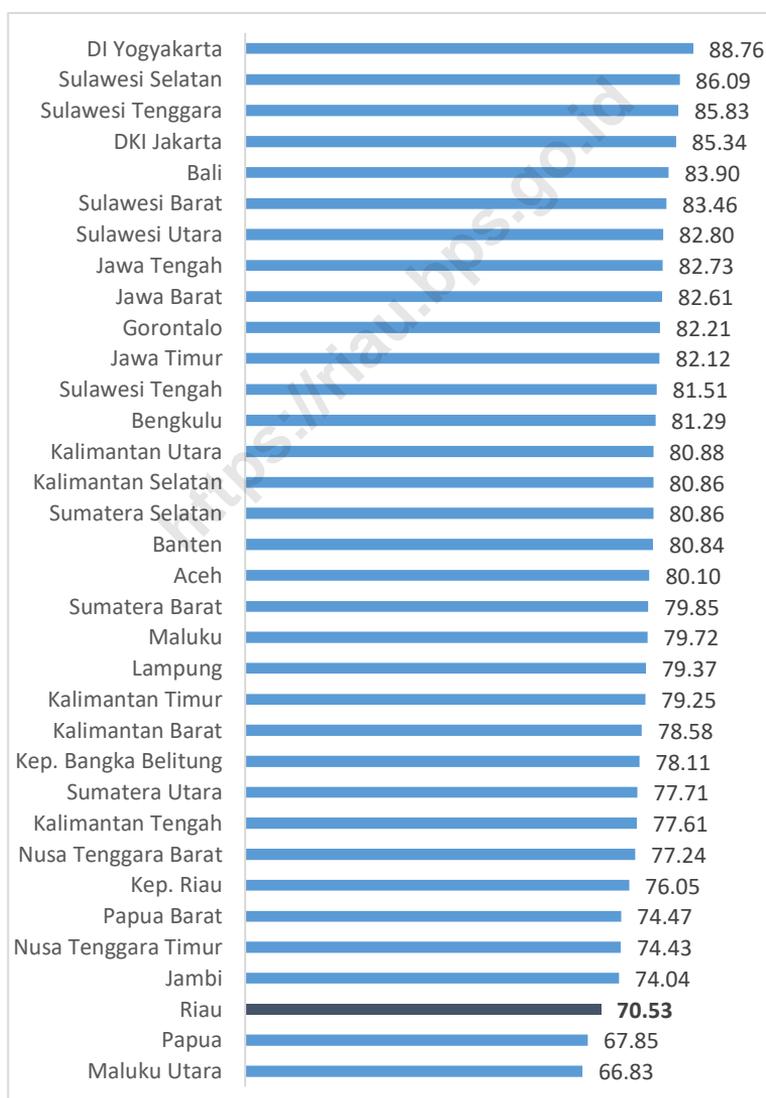


Sejalan dengan aspek kebebasan, nilai aspek kesetaraan IDI di Provinsi Riau juga mengalami penurunan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Namun demikian, nilai aspek kesetaraan masih berada pada kategori sedang. Aspek kesetaraan IDI Provinsi Riau tercatat berada di posisi/peringkat ke-32 di antara 34 provinsi di Indonesia.

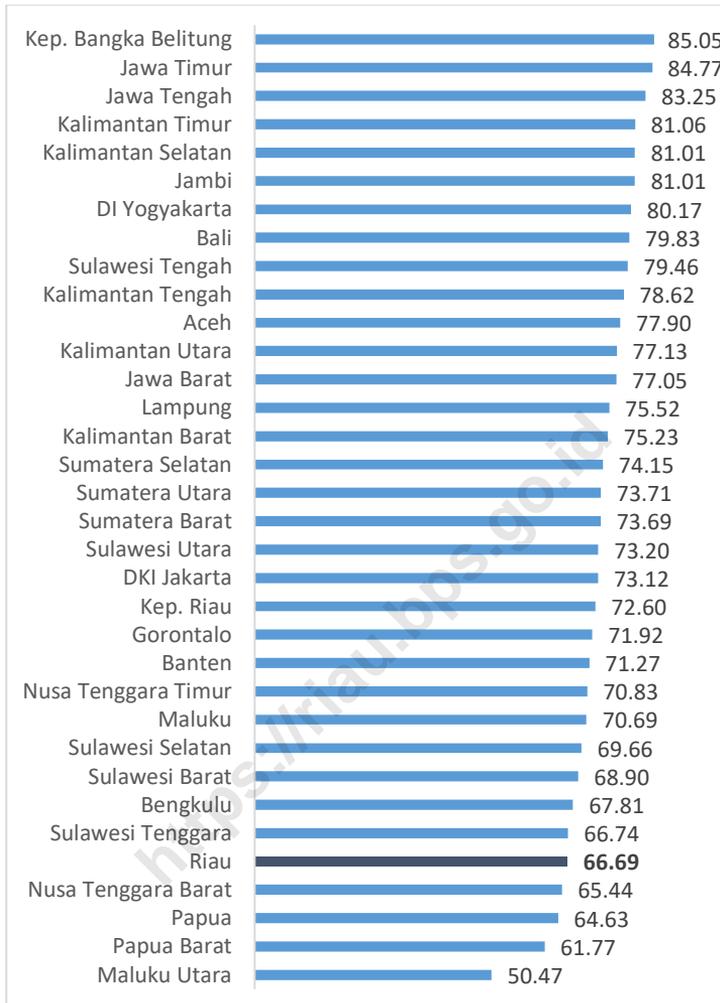
Dari Gambar 2.5. terlihat bahwa nilai aspek kesetaraan IDI yang terdiri dari 7 indikator, yang tertinggi terdapat

di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 88,76 dan diikuti Provinsi Sulawesi Selatan di posisi kedua sebesar 86,09. Sedangkan, nilai aspek kesetaraan IDI terendah terdapat di Provinsi Maluku Utara sebesar 66,83. Terdapat 18 provinsi dengan capaian nilai aspek kesetaraan kategori tinggi (>80) dan 16 provinsi dalam kategori sedang (60-80).

Gambar 2.5. Aspek Kesetaraan IDI menurut Provinsi, 2022



Gambar 2.6. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi IDI menurut Provinsi, 2022



Berbeda dengan aspek kebebasan dan kesetaraan, nilai aspek kapasitas lembaga demokrasi IDI di Provinsi Riau mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Namun demikian, nilai aspek lembaga demokrasi masih berada pada kategori sedang dan merupakan nilai aspek penyusun IDI terendah di Provinsi Riau dibandingkan dengan dua aspek lainnya. Aspek lembaga

demokrasi IDI Provinsi Riau tercatat berada di posisi/peringkat ke-30 di antara 34 provinsi di Indonesia.

Dari Gambar 2.6. terlihat bahwa nilai aspek kapasitas lembaga demokrasi IDI yang terdiri dari 8 indikator, yang tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 85,05 dan diikuti Provinsi Jawa Timur di posisi kedua sebesar 84,77. Sedangkan, nilai aspek kapasitas lembaga demokrasi IDI terendah terdapat di Provinsi Maluku Utara sebesar 50,47. Terdapat 7 provinsi dengan capaian nilai aspek lembaga demokrasi kategori tinggi (>80), 26 provinsi dalam kategori sedang (60-80) dan 1 provinsi memiliki capaian nilai aspek lembaga demokrasi kategori rendah.

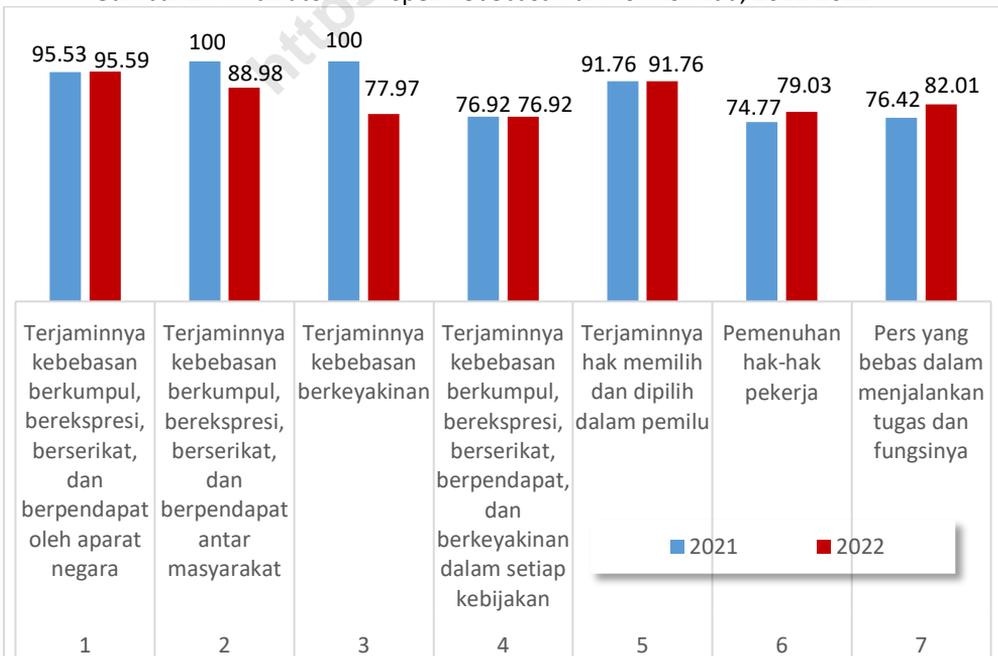
### **Indikator IDI Provinsi Riau**

IDI di Provinsi Riau berada pada peringkat 29 di antara 34 provinsi lainnya di Indonesia. Jika diperhatikan menurut aspek penyusunnya, nilai aspek kebebasan IDI di Provinsi Riau berada di peringkat paling tinggi dibandingkan dengan aspek lainnya. Capaian nilai aspek kebebasan IDI di Provinsi Riau berada pada kategori tinggi. Gambar 2.7. memperlihatkan capaian nilai indikator IDI pada aspek kebebasan di Provinsi Riau tahun 2021-2022. Dari Gambar 2.7. terlihat bahwa nilai indikator IDI tertinggi dari aspek kebebasan di Provinsi Riau dengan pencapaian 100 terdapat pada indikator 2 (terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat) dan indikator 3 (terjaminnya kebebasan berkeyakinan) pada

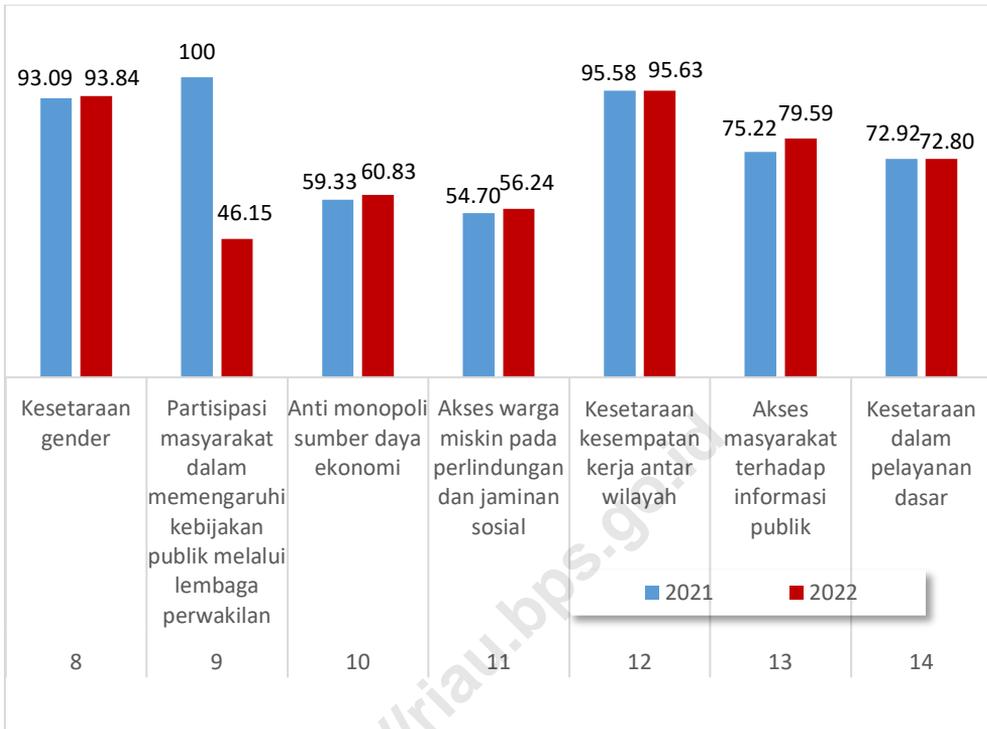
tahun 2021. Akan tetapi, capaian tersebut tidak dapat dipertahankan pada tahun 2022. Indikator 2 dan 3 mengalami penurunan pada tahun 2022 sehingga menyebabkan nilai aspek kebebasan juga mengalami penurunan.

Pada indikator 1 (terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara) dengan pencapaian sebesar 95,53 pada tahun 2021, sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 95,59. Sejalan dengan indikator 1, indikator 6 (pemenuhan hak-hak pekerja) dan indikator 7 (pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya) juga mengalami peningkatan pada tahun 2022. Sementara itu, nilai indikator 4 (terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan) dan indikator 5 (terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu) tidak mengalami perubahan.

Gambar 2.7. Indikator IDI Aspek Kebebasan di Provinsi Riau, 2021-2022



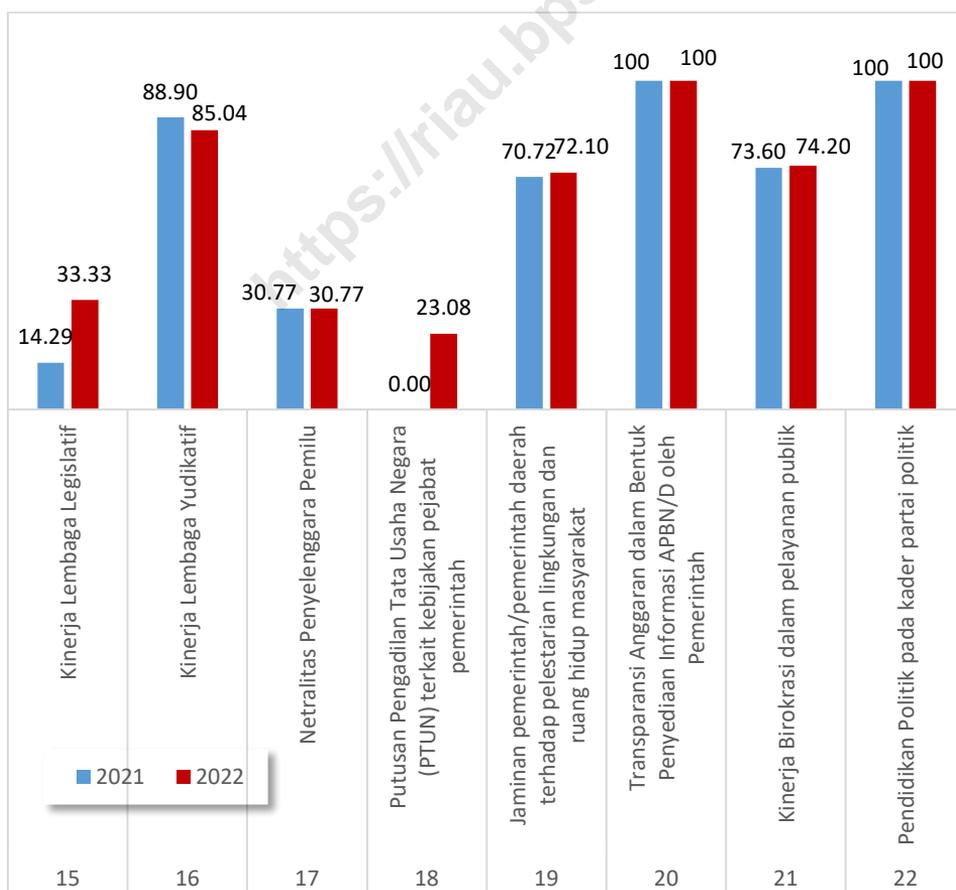
Gambar 2.8. Indikator IDI Aspek Kesetaraan di Provinsi Riau, 2021-2022



Capaian nilai aspek kesetaraan IDI di Provinsi Riau berada pada kategori sedang. Dari Gambar 2.8. terlihat bahwa nilai indikator 9 (partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan) dan indikator 14 (kesetaraan dalam pelayanan dasar) mengalami penurunan, sedangkan indikator lainnya pada aspek kesetaraan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Namun demikian, meskipun 5 dari 7 indikator penyusun aspek kesetaraan IDI Provinsi Riau mengalami peningkatan, tidak cukup untuk menaikkan nilai aspek kesetaraan. Penurunan yang cukup drastis pada nilai indikator 9 menjadi penyebab utama turunnya nilai aspek kesetaraan IDI Provinsi Riau.

Nilai indikator 9 IDI Provinsi Riau mengalami penurunan dari nilai 100 pada tahun 2021 menjadi 46,15 pada tahun 2022. Nilai indikator 9 merupakan nilai indikator terendah pada aspek kesetaraan IDI Provinsi Riau tahun 2022, berbanding terbalik dengan capaian tahun sebelumnya dimana indikator 9 merupakan indikator tertinggi dengan capaian maksimal pada tahun 2021. Sementara itu, nilai indikator tertinggi penyusun aspek kesetaraan tahun 2022 terdapat pada indikator 12 (kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah) yaitu sebesar 95,63.

Gambar 2.9. Indikator IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi di Provinsi Riau, 2021-2022



Nilai aspek kapasitas lembaga demokrasi IDI di Provinsi Riau merupakan nilai aspek penyusun IDI terendah dibandingkan dengan aspek kebebasan dan kesetaraan. Namun demikian, nilai aspek kapasitas lembaga demokrasi merupakan satu-satunya aspek penyusun IDI Provinsi Riau yang mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari capaian indikator-indikator penyusun aspek kapasitas lembaga demokrasi yang sebagian besar mengalami peningkatan. Hanya 1 dari 8 indikator penyusun aspek kapasitas lembaga demokrasi IDI yang mengalami penurunan yaitu indikator 16 (kinerja lembaga yudikatif).

Dari Gambar 2.9. terlihat bahwa nilai indikator IDI tertinggi dari aspek kapasitas lembaga demokrasi di Provinsi Riau dengan pencapaian sebesar 100 terdapat pada indikator 20 (transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah) dan indikator 22 (pendidikan politik pada kader partai politik). Kedua indikator tersebut telah mencapai nilai maksimal dan berhasil dipertahankan pada tahun 2022. Meskipun terdapat 2 indikator penyusun aspek kapasitas lembaga demokrasi yang mencapai nilai maksimal, hal ini tidak cukup untuk mendongkrak nilai aspek kapasitas lembaga demokrasi untuk menyusul nilai aspek kebebasan dan kesetaraan yang tidak memiliki nilai indikator maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat 3 indikator pada aspek kapasitas lembaga demokrasi yang berada pada kategori rendah.

Sebaliknya, nilai indikator IDI aspek kapasitas lembaga demokrasi Provinsi Riau terendah terdapat pada indikator 18 (PTUN terkait kebijakan pejabat pemerintah). Namun demikian nilai indikator 18 telah mengalami

peningkatan pada tahun 2022 sebesar 23,08 dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2021 yang bernilai 0.

<https://riau.bps.go.id>



# bab 3

## PENUTUP



# METODE BARU

## TAHUN KE - 2

Skala IDI berada pada rentang 0-100, dimana semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan kualitas demokrasi suatu wilayah semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah angka indeks, menunjukkan kualitas demokrasi suatu wilayah semakin buruk.

Angka IDI dibagi dalam tiga kategori, yakni tinggi ( $>80$ ), sedang ( $60-80$ ), dan rendah ( $<60$ ).

Tantangan demokrasi di Provinsi Riau ditunjukkan oleh lima indikator dengan nilai berada pada kategori rendah. Indikator tersebut antara lain indikator 18, 17, dan 15 yang merupakan indikator penyusun aspek lembaga demokrasi serta indikator 9 dan 11 yang merupakan indikator penyusun aspek kesetaraan.





## PENUTUP

### Kesimpulan

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah Indonesia pada RPJMN 2010-2014, 2015-2019, serta 2020-2024. IDI 2022 merupakan angka IDI kedua yang dihitung dengan metode baru, sehingga angkanya hanya dapat dibandingkan dengan 2021. IDI disusun oleh 22 indikator yang dikombinasikan menjadi 3 aspek, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Skala IDI berada pada rentang 0-100, di mana semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan kualitas demokrasi suatu wilayah yang semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah angka indeks, menunjukkan kualitas demokrasi suatu wilayah yang semakin buruk.

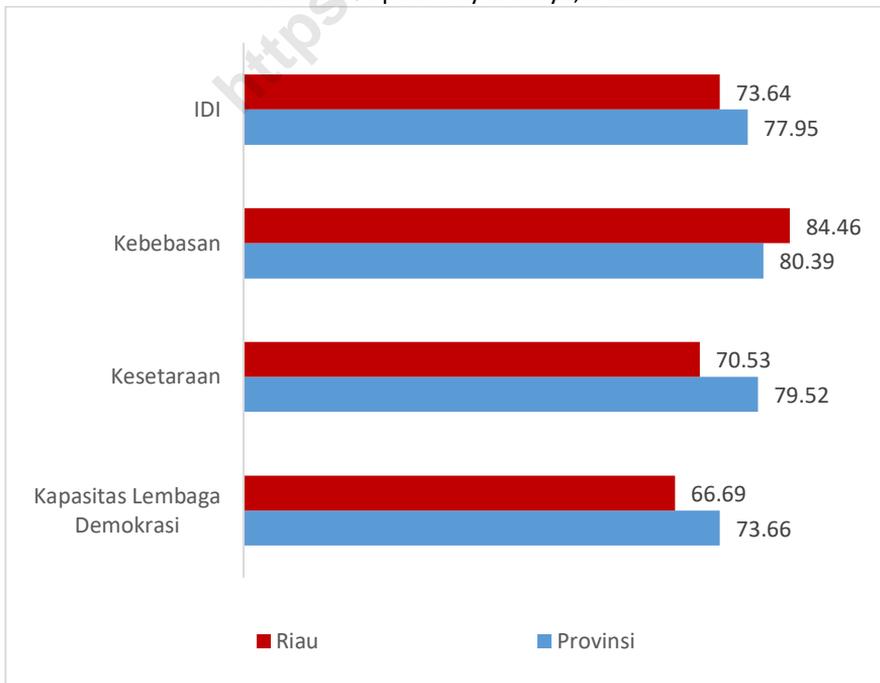
Angka IDI dibagi dalam tiga kategori, yakni tinggi (>80), sedang (60-80), dan rendah (<60). IDI di Provinsi Riau pada tahun 2022 sebesar 73,64 berada pada kategori sedang dengan peringkat ke-29 di antara 34 provinsi di Indonesia. Angka ini menurun 2,02 poin dibandingkan dengan angka IDI Provinsi Riau tahun 2021 yang sebesar 75,66 dan berada pada peringkat ke 19.

Angka IDI Provinsi Riau lebih rendah 4,31 poin pada tahun 2022, dibandingkan dengan rata-rata IDI seluruh provinsi di Indonesia. Sementara itu, jika dilihat dari ketiga aspek penyusunnya, nilai aspek kebebasan IDI di Provinsi Riau paling tinggi dibandingkan dengan dua aspek

penyusun lainnya. Nilai aspek kebebasan IDI di Provinsi Riau sudah berada pada kategori tinggi yakni sebesar 84,46 dan lebih tinggi 4,07 poin dibandingkan dengan rata-rata nilai aspek kebebasan IDI seluruh provinsi di Indonesia.

Namun, pada dua aspek penyusun IDI lainnya di Provinsi Riau, masih memiliki nilai di bawah rata-rata provinsi. Hal ini sejalan dengan nilai IDI Provinsi Riau. Nilai kedua aspek tersebut berada pada kategori sedang. Nilai aspek kesetaraan IDI Provinsi Riau sebesar 70,53. Angka ini lebih rendah 8,99 poin dibandingkan dengan rata-rata nilai aspek kesetaraan seluruh provinsi. Sementara itu, nilai aspek kapasitas lembaga demokrasi IDI Provinsi Riau sebesar 66,69 dan lebih rendah 6,97 poin dibandingkan dengan rata-rata nilai aspek lembaga demokrasi IDI seluruh provinsi.

Gambar 3.1. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi dan Provinsi Riau menurut Aspek Penyusunnya, 2022



Pemerintah dapat melihat berbagai persoalan yang ada pada data IDI 2022 sebagai acuan program penguatan demokrasi. Pada aspek kebebasan, pemerintah perlu melihat ancaman kebebasan berpendapat dan berkeyakinan yang masih terjadi sebagai prioritas. Pada aspek kesetaraan, indikator partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan merupakan indikator dengan skor terendah di Provinsi Riau.

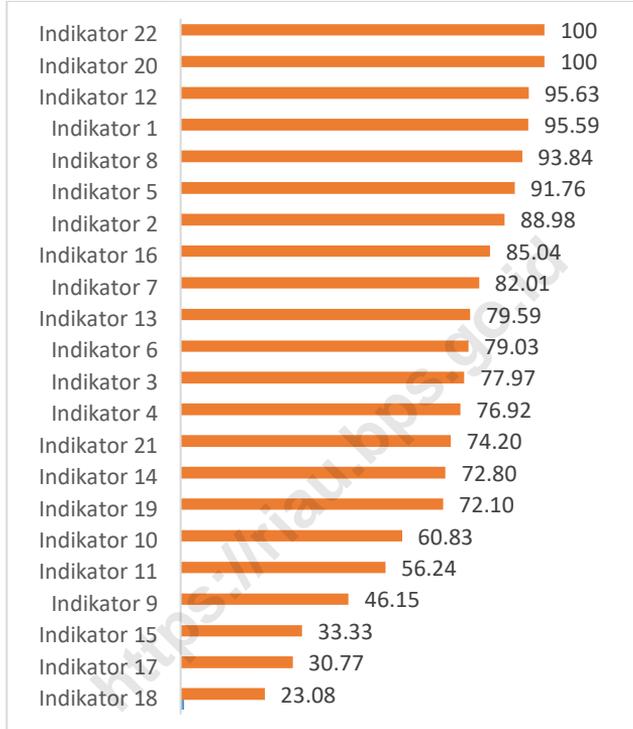
Pada aspek kapasitas lembaga demokrasi, pemerintah perlu memberikan perhatian untuk meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi. Pemerintah dapat melakukan penguatan lembaga-lembaga demokrasi dengan sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia ke lembaga terkait. Selain itu, pemerintah juga perlu bersinergi dengan penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan tata kelola yang lebih baik agar secara nasional netralitas penyelenggara pemilu semakin meningkat.

### **Saran**

Dari refleksi terhadap hasil IDI di atas, secara umum rekomendasi yang dapat diajukan adalah pentingnya menumbuhkan dan mengembangkan budaya demokrasi serta meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi. Untuk dapat melakukan hal di atas, beberapa langkah yang mendesak untuk diambil adalah: Pertama, mendorong aparat pemerintah untuk memberikan jaminan pada penyampaian aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kedua, pemerintah perlu memperkuat keadilan dalam bidang ekonomi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat agar terhindar dari kesenjangan ekonomi di daerah. Ketiga, warga

negara/masyarakat dalam berekspresi dan berpendapat hendaknya mematuhi aturan dan kaidah yang berlaku (memperhatikan adab berdemokrasi).

Gambar 3.2. Indikator Penyusun Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau, 2022



Sesuai dengan hasil penghitungan IDI Provinsi Riau 2022, aspek kesetaraan dan aspek lembaga demokrasi perlu mendapatkan perhatian khusus. Semakin rendah nilai IDI, artinya demokrasi di suatu daerah semakin terhambat. Untuk menentukan langkah-langkah perbaikan demokrasi di suatu daerah, perlu diperhatikan lebih dalam pada indikator-indikator yang mendapatkan skor rendah. Jika diperhatikan pada Gambar 3.2. di atas, lima skor indikator IDI terendah di Provinsi Riau merupakan indikator penyusun aspek kesetaraan dan lembaga demokrasi.

Tantangan demokrasi di Provinsi Riau ditunjukkan oleh lima indikator dengan nilai berada pada kategori rendah. Indikator-indikator tersebut antara lain indikator 18, 17, dan 15 yang merupakan indikator penyusun aspek lembaga demokrasi serta indikator 9 dan 11 yang merupakan indikator penyusun aspek kesetaraan. Untuk itu, perlu ditelaah lebih dalam terkait indikator-indikator ini sehingga dapat dilakukan perbaikan kondisi demokrasi di Provinsi Riau.

Pada aspek kapasitas lembaga demokrasi, terdapat tiga indikator terendah pada IDI Provinsi Riau. Pertama, indikator 18 dengan skor 23,08, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah. Indikator ini bersumber dari jumlah kebijakan/keputusan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah per jumlah pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah kebijakan/keputusan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah di PTUN akan menjadikan skor indikator ini menjadi rendah. Kedua, indikator 17 dengan skor 30,77, yaitu netralitas penyelenggara pemilu. Indikator ini merupakan perbandingan jumlah kasus yang terkait dengan keberpihakan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu dalam lingkup provinsi per jumlah pemerintah daerah yang bersumber dari Bawaslu, untuk itu perlu persiapan yang matang dalam menghadapi pemilu berikutnya. Ketiga, indikator 15 dengan skor 33,33, yaitu kinerja lembaga legislatif. Indikator ini didapatkan dari persentase Perda yang disahkan terhadap target Propemperda.

Selain aspek kapasitas lembaga demokrasi, aspek kesetaraan juga harus diperhatikan karena dua indikator

penyusunnya masih berada pada kategori rendah. Pertama, indikator 9 dengan skor 46,15, yaitu partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan. Data ini merupakan prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dll) di DPRD Provinsi terhadap total anggota DPRD Provinsi. Perlu didorong agar kegiatan tersebut dilakukan lebih terkoordinasi sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Kedua, indikator 11 dengan skor 56,24, yaitu akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial. Data ini merupakan persentase rumah tangga miskin yang menerima bantuan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

# DAFTAR PUSTAKA



<https://tridip.com>



## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2021. *Naskah Akademik Revisi Indeks Demokrasi Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.

\_\_\_\_\_. 2022. *[Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi 2021-2022*.  
<https://www.bps.go.id/indicator/34/2159/1/-metode-baru-indeks-demokrasi-indonesia-menurut-provinsi.html>. diakses pada 31 Juli 2023 pukul 11:02.

\_\_\_\_\_. 2022. *[Metode Baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi 2021-2022*.  
<https://www.bps.go.id/indicator/34/2160/1/-metode-baru-aspek-indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-provinsi.html>. diakses pada 31 Juli 2023 pukul 11:03.

\_\_\_\_\_. 2023. *Pedoman Teknis Indeks Demokrasi Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2022. *Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 2021*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.

\_\_\_\_\_. 2022. *Angka IDI 2022 Provinsi Riau*.  
<https://riau.bps.go.id/statictable/2023/07/05/390/angka-idi-2022-provinsi-riau.html>. diakses pada 31 Juli 2023 pukul 15:50.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2022. *Indeks Demokrasi Indonesia 2021 Tantangan Konsolidasi Demokrasi Menjelang Pemilu 2024*. Jakarta : Kemenko Polhukam

Widiyarsi, Ika Rusinta. 2021. *Revisi Indeks Demokrasi Indonesia*.  
<https://papuabaratnews.co/wacana/revisi-indeks-demokrasi-indonesia/> diakses pada 30 Juli 2023 pukul 18:23.



# LAMPIRAN





## LAMPIRAN

Sumber Data Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru

No.	Indikator	Data/Informasi yang Dibutuhkan	Sumber
1.	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara (Dimensi Politik)	<p><b>Provinsi:</b> Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara pada pemerintah provinsi per 100.000 penduduk dewasa (17+)</p> <p><b>Pusat:</b> Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara pada pemerintah pusat per K/L</p>	<p><b>Provinsi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Surat Kabar</li> <li><input type="checkbox"/> Portal Berita <i>Online</i></li> <li><input type="checkbox"/> Komnas HAM</li> <li><input type="checkbox"/> FGD</li> </ul> <p><b>Pusat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Portal Berita <i>Online</i></li> <li><input type="checkbox"/> Komnas HAM</li> <li>FGD</li> </ul>
2.	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat (Dimensi Politik)	<p><b>Provinsi:</b> Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh masyarakat per 100.000 penduduk dewasa (17+)</p> <p><b>Pusat:</b> Tidak ada</p>	<p><b>Provinsi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Surat Kabar</li> <li><input type="checkbox"/> Portal Berita <i>Online</i></li> <li><input type="checkbox"/> Komnas HAM</li> <li><input type="checkbox"/> FGD</li> </ul> <p><b>Pusat:</b> Tidak ada</p>
3.	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan (Dimensi Sosial)	<p><b>Provinsi:</b> Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkeyakinan per 100.000 penduduk dewasa (17+)</p> <p><b>Pusat:</b> Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkeyakinan per jumlah K/L</p>	<p><b>Provinsi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Surat Kabar</li> <li><input type="checkbox"/> Portal Berita <i>Online</i></li> <li><input type="checkbox"/> Komnas HAM</li> <li><input type="checkbox"/> FGD</li> </ul> <p><b>Pusat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Portal Berita <i>Online</i></li> <li><input type="checkbox"/> Komnas HAM</li> <li><input type="checkbox"/> FGD</li> </ul>

No.	Indikator	Data/Informasi yang Dibutuhkan	Sumber
4.	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan (Dimensi Politik)	<p><b>Provinsi :</b> Jumlah pemerintah daerah yang memiliki aturan yang melanggar kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan per jumlah pemerintah daerah</p> <p><b>Pusat :</b> Jumlah K/L yang memiliki aturan yang melanggar kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan per jumlah K/L</p>	<p><b>Provinsi :</b> <input type="checkbox"/> Aturan tertulis Pemerintah Daerah <input type="checkbox"/> FGD</p> <p><b>Pusat :</b> <input type="checkbox"/> Komnas HAM FGD</p>
5.	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat (Dimensi Politik)	<p><b>Provinsi:</b> Kasus pelanggaran pemilu per 100.000 pemilih</p> <p><b>Pusat:</b> Tidak ada</p>	<p><b>Provinsi:</b> Badan Pengawas Pemilu RI</p> <p><b>Pusat:</b> Tidak ada</p>
6.	Pemenuhan hak-hak pekerja (Dimensi Ekonomi)	<p><b>Provinsi:</b> Persentase pekerja yang memiliki jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan dana pensiun.</p> <p><b>Pusat:</b> Tidak ada</p>	<p><b>Provinsi:</b> Sakernas BPS</p> <p><b>Pusat:</b> Tidak ada</p>
7.	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Dimensi Politik, Ekonomi, dan Sosial)	<p><b>Provinsi:</b> Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi</p> <p><b>Pusat:</b> Indeks Kemerdekaan pers NAC</p>	<p><b>Provinsi:</b> Dewan Pers</p> <p><b>Pusat:</b> Dewan Pers</p>
8.	Kesetaraan gender (Dimensi Politik, Ekonomi, dan Sosial)	<p><b>Provinsi:</b> Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi</p> <p><b>Pusat:</b> Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional</p>	<p><b>Provinsi:</b> Badan Pusat Statistik (BPS)</p> <p><b>Pusat:</b> Badan Pusat Statistik (BPS)</p>

No.	Indikator	Data/Informasi yang Dibutuhkan	Sumber
9.	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan (Dimensi Politik)	<p><b>Provinsi:</b> Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dll) di DPRD Provinsi terhadap total anggota DPRD Provinsi</p> <p><b>Pusat:</b> Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR dan DPD (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dll) yang melibatkan masyarakat, terhadap total anggota MPR</p>	<p><b>Provinsi:</b>  <input type="checkbox"/> Sekretariat DPRD Provinsi.  <input type="checkbox"/> Koran  <input type="checkbox"/> Portal berita <i>online</i>  <input type="checkbox"/> FGD</p> <p><b>Pusat:</b>  <input type="checkbox"/> Sekretariat DPR dan DPD  <input type="checkbox"/> Portal berita <i>online</i>  FGD</p>
10.	Anti monopoli sumber daya ekonomi (Dimensi Ekonomi)	<p><b>Provinsi:</b> Indeks Persaingan Usaha Provinsi</p> <p><b>Pusat:</b> Tidak ada</p>	<p><b>Provinsi:</b> KPPU</p> <p><b>Pusat:</b> Tidak ada</p>
11.	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial (Dimensi Ekonomi)	<p><b>Provinsi:</b> Persentase rumah tangga miskin yang menerima bantuan pada masing-masing provinsi</p> <p><b>Pusat:</b> Tidak ada</p>	<p><b>Provinsi:</b> Badan Pusat Statistik (BPS)</p> <p><b>Pusat:</b> Tidak ada</p>
12.	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah (Dimensi Ekonomi)	<p><b>Provinsi:</b> Tingkat Kesempatan Kerja Provinsi</p> <p><b>Pusat:</b> Tidak ada</p>	<p><b>Provinsi:</b> Badan Pusat Statistik (BPS)</p> <p><b>Pusat:</b> Tidak ada</p>
13.	Akses masyarakat terhadap informasi publik (Dimensi Politik)	<p><b>Provinsi:</b> Indikator Akses dan Diseminasi Informasi pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi</p> <p><b>Pusat:</b> Indikator Akses dan Diseminasi Informasi pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik NAC</p>	<p><b>Provinsi:</b> Komisi Pusat Informasi</p> <p><b>Pusat:</b> Komisi Informasi Pusat</p>

No.	Indikator	Data/Informasi yang Dibutuhkan	Sumber
14.	Kesetaraan dalam pelayanan dasar provinsi (Dimensi Sosial)	<b>Provinsi:</b> Proporsi penduduk dengan akses pada layanan dasar (air minum, sanitasi dasar, fasilitas penyehatan dasar, APM SD – SMA) <b>Pusat:</b> Tidak ada	<b>Provinsi:</b> Badan Pusat Statistik (BPS)  <b>Pusat:</b> Tidak ada
15.	Kinerja lembaga legislatif (Dimensi Politik)	<b>Provinsi:</b> Persentase Perda yang disahkan terhadap target Propemperda <b>Pusat:</b> Persentase UU yang disahkan terhadap target Prolegnas Prioritas Tahunan	<b>Provinsi:</b> <input type="checkbox"/> Sekretariat DPRD Provinsi <input type="checkbox"/> Surat Kabar <input type="checkbox"/> Portal Berita Online <input type="checkbox"/> FGD <b>Pusat:</b> Sekretariat DPR
16.	Kinerja lembaga yudikatif (Dimensi Politik)	<b>Provinsi:</b> Persentase putusan terhadap beban kasus pada pengadilan tinggi dan negeri <b>Pusat:</b> Persentase putusan terhadap beban kasus di MA dan MK	<b>Provinsi:</b> Mahkamah Agung  <b>Pusat:</b> Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
17.	Netralitas penyelenggara pemilu (Dimensi Politik)	<b>Provinsi:</b> Jumlah kasus yang terkait dengan keberpihakan penyelenggaraan pemilu oleh Penyelenggara pemilu dalam lingkup provinsi per jumlah pemerintah daerah <b>Pusat:</b> Jumlah putusan terkait keberpihakan penyelenggara pemilu per jumlah anggota penyelenggara pemilu	<b>Provinsi:</b> Bawaslu  <b>Pusat:</b> DKPP
18.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah (Dimensi Politik)	<b>Provinsi:</b> Kebijakan/ keputusan pejabat pemda yang dinyatakan bersalah per jumlah pemerintah daerah	<b>Provinsi:</b> PTUN

No.	Indikator	Data/Informasi yang Dibutuhkan	Sumber
		<b>Pusat:</b> Kebijakan/keputusan pejabat pemerintah pusat yang dinyatakan bersalah per jumlah K/L	<b>Pusat:</b> PTUN
19.	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	<b>Provinsi:</b> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi <b>Pusat:</b> Tidak ada	<b>Provinsi:</b> KLHK  <b>Pusat:</b> Tidak ada
20.	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah (Dimensi Politik)	<b>Provinsi:</b> Persentase informasi APBD yang tersedia di website Pemda <b>Pusat:</b> Informasi APBN yang tersedia di Kemenkeu	<b>Provinsi:</b> Pemerintah daerah  <b>Pusat:</b> Kemenkeu
21.	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik (Dimensi Politik)	<b>Provinsi:</b> Indeks Pelayanan Publik Pemda <b>Pusat:</b> Indeks Pelayanan Publik K/L	<b>Provinsi:</b> Kemenpan RB  <b>Pusat:</b> Kemenpan RB
22	Pendidikan politik pada kader partai politik (Dimensi Politik)	<b>Provinsi:</b> Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPRD oleh kepengurusan lingkup provinsi terhadap jumlah partai politik di DPRD <b>Pusat:</b> Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPR terhadap jumlah partai politik di DPR	<b>Provinsi:</b> <input type="checkbox"/> Partai Politik <input type="checkbox"/> Bakesbangpol <input type="checkbox"/> Surat Kabar <input type="checkbox"/> Portal Berita Online <input type="checkbox"/> FGD  <b>Pusat:</b> <input type="checkbox"/> Partai Politik <input type="checkbox"/> Kementerian Dalam Negeri

# DATA

**MENCERDASKAN BANGSA**

---



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI RIAU**

Jl. Pattimura No.12, Pekanbaru 28131

Telp. (0761) 23042

Homepage: //riau.bps.go.id Email : bps1400@bps.go.id

ISSN 2657-0874



9 772657 087000